

Kemerdekaan sebagai Pembebasan Kelas: Refleksi Marxis atas Perjuangan Sosial Ekonomi Indonesia pada Masa Kolonial hingga Pascakemerdekaan (1900–1950)

Asrar Ernas^{1*}

Universitas Pattimura, Jl. Jend. A. Yani No. 9 Ambon, Maluku, 97124, asraernas@gmail.com

*¹Corresponding email: asraernas@gmail.com

Abstract

This study examines Indonesia's struggle for independence through the lens of Karl Marx, emphasizing class conflict between the colonial powers and the indigenous population. It situates the nationalist movement within a broader socio-economic context, revealing that independence was not solely a political project, but part of a prolonged class struggle from the early 20th century until the post-independence era. Using historical methods grounded in the framework proposed by Kuntowijoyo (2003), this research analyzes archival and secondary literature to uncover how colonial exploitation structured Indonesian society along class lines. The findings highlight how figures such as Soekarno, Hatta, and Tan Malaka integrated class consciousness into national resistance, and how post-1945 Indonesia continued to grapple with inherited social and economic inequalities. This study offers a new perspective to view independence as a process of class liberation, reflecting on how the fight for political freedom intertwined with the quest for economic justice..

Keywords

Karl Marx; Indonesia; social; economic; history.

Abstrak

Studi ini meneliti perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan melalui lensa Karl Marx dengan penekanan pada konflik kelas antara kekuatan kolonial dan penduduk pribumi. Penelitian ini menempatkan gerakan nasionalis dalam konteks sosial-ekonomi yang lebih luas, menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan semata perjuangan politik, melainkan juga perjuangan kelas yang berlangsung sejak awal abad ke-20 hingga pascakemerdekaan. Dengan menggunakan metode sejarah sebagaimana dikembangkan oleh Kuntowijoyo (2003), penelitian ini menganalisis literatur primer dan sekunder untuk mengungkap bagaimana eksploitasi kolonial membentuk struktur sosial Indonesia berdasarkan kelas. Temuan penelitian menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Tan Malaka mengintegrasikan kesadaran kelas dalam perlawanan nasional, serta bagaimana Indonesia pasca-1945 terus berjuang melawan ketimpangan sosial-ekonomi yang diwariskan kolonialisme. Studi ini menawarkan sudut pandang baru yang melihat kemerdekaan sebagai proses pembebasan kelas yang kompleks, di mana perjuangan politik dan keadilan ekonomi saling terkait.

Kata kunci

Karl Marx; Indonesia; sosial; ekonomi; sejarah.

**Received: January 15th, 2025*

**Revised: April 18th, 2025*

**Accepted: April 29th, 2025*

**Published: April 30th, 2025*

PENDAHULUAN

Inilah dengan tiada ragu kita sebut sebagai perjuangan bangsa besar, perjuangan yang melibatkan hampir semua aspek strategis. Politik dan militer merupakan dua sektor penting, tetapi juga beberapa elemen sosial ekonomi yang lebih dalam bahkan turut berpengaruh dalam proses pergerakan bangsa. Lebih dari tiga ratus tahun lamanya bangsa Indonesia dibawah pemerintahan kolonial Belanda yang bisa dikatakan telah menyusupi ketimpangan sosial ekonomi dengan serius (Poespoprodjo, 1980). Tindakan ini tidak terbatas pada kontrol wilayah, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap struktur masyarakat yang sangat terkelompok secara kelas yaitu kelas dominasi yang dikendali oleh koloni Belanda termasuk elite-elite yang berkomplot dengan mereka mendominasi kekayaan dan perekonomian, sementara bangsanya tertindas dalam ekonomi yang sangat buruk dan terbelakang (Sartono, 2004). Bukan hanya secara eksploitasi tenaga kerja pribumi, sistem feudalistik dan kolonial yang diterapkan oleh Belanda ini juga membuat rakyat pribumi melangkah jauh dari kemajuan sosial dan ekonomi (Ricklefs, 1993)

Pada bagian ini, teori yang dikemukakan oleh Karl Marx mengenai analisis kelas sosial dan ketidakadilan ekonomi yang berlaku untuk perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan. Marx memandang sejarah sebagai perjuangan berturut-turut antara kelas-kelas masyarakat di mana para penindas selalu mimpi pada ancaman dari yang tertindas (Marx & Engels, 1848). Dalam artikel ini, teori kelas Marxis dapat menjelaskan mengapa memilih yang dilakukan oleh bangsa Belanda dan rakyat Belanda terhadap rakyat Indonesia sebenarnya bukan hanya memikirkan politik tetapi juga eksploitasi ekonomi yang lebih dalam (Cohen, 2013).

Teori Marxis sepertinya menyarankan bahwa kelas borjuis (yaitu pemilik modal dan penguasa) selalu berkonflik dengan kelas proletariat (yang terdiri dari pekerja dan populasi manusia yang terdominasi) (Marx, 1867). Berfokus pada Indonesia, kolonialisme Belanda membangun struktur sosial yang jelas berdasarkan kelas penguasaan kolonial dan subjek pribumi yang ditindas (Suwito, 2009). Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang ada selama kolonialisme dapat diidentifikasi sebagai pendahulu yang kuat bagi munculnya gerakan-gerakan nasionalis yang ingin mengirimkan Indonesia secara politik, sosial, dan ekonomi (Anderson, 2006). Dalam perjuangan itu, aspirasi rakyat Indonesia adalah untuk memperoleh kembali hak-hak mereka yang hilang, anggota mengira kelas, dan mengubah sistem sosial yang telah timpang.

Berdasarkan pemikiran Karl Marx, perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan sekedar upaya untuk mengusir penjajah, namun perjuangan kelas untuk memerangi ketidakadilan sosial ekonomi yang sudah mengakar. Penjelasan ini membukakan ruang untuk memahami pergerakan Indonesia, di mana para pembaca dapat menghargai

konflik antar kelas dalam komunitas Indonesia yang memungkinkan rekonstruksi struktur kolonial (Sutrisno, 1997).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui teori Karl Marx dan fokus pada konflik kelas antara elit penjajah kolonial Belanda dengan orang pribumi yang tertindas. Selain itu, penelitian ini akan menggali bagaimana persaingan kelas yang dilakukan oleh penjajah Belanda mempengaruhi dinamika sosial politik Indonesia selama periode ini (Friedman, 1995). Melalui penerapan teori Marx tentang hubungan antara kelas borjuis, pemerintah, dan proletariat, rakyat, penelitian ini akan mengidentifikasi perlawanan terhadap perjuangan menentang kolonialisasi politik tetapi juga perlawanan terhadap ekonomi karena menindas kelas yang tercerahkan. Subjek utama penelitian ini adalah membawa ke permukaan peran sentral kesadaran kelas dan perlawanan ekonomi dalam retorika dan praktek mobilitas kemerdekaan Indonesia (Hutomo, 2011).

Melalui penjelasan sebagai bentuk pembatalan, Penelitian ini berharap menjadi kontribusi penting dalam memahami sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan memperkenalkan perspektif mendalam tentang perjuangan kelas selama masa kolonial. Dengan demikian, berdasarkan teori Marx, Penelitian ini menawarkan pandangan baru yang memungkinkan kita melihat perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai proses membebaskan kelompok sosial yang cenderung mencapai keseimbangan sosial dan ekonomi daripada hanya kemerdekaan politik dari posisi penjajahan (Smith, 2000).

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk menekankan kontribusi kesadaran kelas dalam perjuangan kemerdekaan, bagaimana konflik antara kelas penguasa kolonial dan kelas pribumi yang tertindas menjadi salah satu kekuatan pendorong utama pergerakan nasional yang pada akhirnya membuahkan hasil dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia (Situmorang, 2015). Dengan demikian, teori Marxis tidak hanya memberikan analisis sosial yang lebih tajam tentang ketidakadilan di era kolonial, tetapi juga mengajarkan kita bahwa perjuangan nasional Indonesia sebenarnya jauh lebih kompleks, yaitu upaya untuk mengubah struktur sosial-ekonomi.

Penelitian ini juga memiliki signifikansi untuk memahami dampak perjuangan kelas terhadap kebijakan sosial dan ekonomi yang diimplementasikan pasca-kemerdekaan Indonesia dan relevansinya dalam kerangka Indonesia yang modern, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi isu yang paling relevan (Bauer, 2012). Perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam perspektif Marx juga lebih mengkomprehensifkan pandangan pramonistisme negara merdeka menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya (Wang, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah sebagaimana dijelaskan oleh Kuntowijoyo (2003), yang terdiri atas empat tahapan

utama yaitu (1) heuristik, dalam hal ini penulis menggunakan sumber sekunder untuk mencari dan mengumpulkan materi dari buku, jurnal, artikel dan tulisan yang relevan dengan konteksnya. (2) kritik, setelah itu di lanjutkan dengan melakukan analisis terhadap semua data yang telah ada, (3) interpretasi, melakukan penafsiran dari data yang sudah dianalisis, dan di tahap terakhir dengan melakukan penulisan sejarah (Historiografi). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk mendukung analisis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka teori berdasarkan literatur dan menjelaskan dinamika perjuangan kelas dalam konteks kolonialisme Belanda di Indonesia. Teori-teori yang digunakan didasarkan pada konsep-konsep Karl Marx dan penafsiran sejarah sosial-ekonomi, khususnya dalam melihat eksploitasi kolonial sebagai struktur penindasan kelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, kajian sejarah tentang kolonialisme Belanda cenderung mengalami penurunan dalam wacana publik, terutama di tingkat pendidikan formal maupun media populer, yang lebih menekankan pada narasi perjuangan nasional tanpa menyoroti dampak struktural kolonialisme terhadap kehidupan sosial-ekonomi rakyat. Menurut Ricklefs (2008), penekanan pada aspek politik kemerdekaan telah mengaburkan warisan ketimpangan kelas sosial yang ditinggalkan kolonialisme. Hal ini juga ditegaskan oleh Vickers (2005) yang menyatakan bahwa narasi sejarah pascakemerdekaan Indonesia lebih banyak difokuskan pada pembangunan dan nasionalisme ketimbang pembacaan kritis terhadap warisan kolonial.

Dan sistem ekonomi yang diterapkan oleh Belanda, jalannya penjajahan, bukan hanya menindas rakyat dalam hal politik, tetapi juga dalam hal ekonomi. Salah satunya ialah sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) pada abad ke-19 itu, di mana para petani Indonesia diwajibkan menanam tanaman komoditas yang mana akan menguntungkan bagi penjajah, seperti kopi, tebu, dan indigo. Tanaman ini untuk ekspor bukan untuk memperluas, dan hanya untuk dijual ke pasar Eropa. Petani asli harus menyerahkan sebagian besar hasil tanah itu kepada pemerintah kolonial, dan mereka sendiri hidup dalam kemiskinan sangat akut (Behrend, 1983; Vickers, 2005). Ketimpangan itu membuat jurang sosial yang dalam, di mana sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan, sedangkan elit kolonial memperoleh kekayaan dari eksploitasi.

Penindasan ekonomi membangun kesadaran kelas di antara orang-orang. Ketidaksetaraan kelas yang selama ini tidak terlihat oleh mereka telah membuat mereka melihat dan mengenali ketidakadilan sosial dan ekonomi terhadap rakyat mereka sendiri dalam struktur sistem kelas kolonial. Berlawanan dengan konsepsi Marx, ini adalah struktur yang diwariskan secara ilusi yang mengungkapkan eksploitasi kelas oleh kaum borjuis di mana kelas yang berkuasa mengisolasi keuntungannya dari penderitaan kaum proletar, yang merupakan satu-satunya bagian yang produktif.

Perjuangan Kelas Dalam Gerakan Nasional

Teori perjuangan kelas dalam pengertian Marxis menggambarkan sejarah sebagai konflik antara kelas-kelas yang saling bertentangan. Dalam hal ini, perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda tidak bisa semata-mata hanya perjuangan untuk kemerdekaan politik, tetapi juga perjuangan melawan struktur kelas yang merusak, eksploitatif, dan tidak adil. Pergerakan nasional Indonesia pada tahun-tahun awal abad ke-20 mencerminkan bagaimana rakyat Indonesia berusaha menyingkirkan cengkeraman kolonial yang berasal dari struktur berbasis kelas. Organisasi-organisasi yang muncul pada masa itu memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran kelas dan memobilisasi perjuangan kemerdekaan.

Dimensi perjuangan kelas dalam Pergerakan Nasional menyentuh 3 aspek penting di antaranya: (1) Budi Utomo (1908): Organisasi ini menjadi yang pertama kali memperkenalkan gagasan nasionalisme modern, meskipun pada awalnya lebih fokus pada perbaikan sosial dan pendidikan. Namun, Budi Utomo juga membantu dalam upaya membangun kesadaran akan ketidakadilan yang disebabkan oleh eksploitasi kolonial (Haris, 2008). (2). Sarekat Islam (1912): Sarekat Islam muncul dengan menekankan pada perjuangan melawan imperialisme barat dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi umat Islam, yang sebagian besar berasal dari kasta rendah. Sarekat Islam melihat perjuangan ekonomi sebagai komponen integral dari perjuangan kemerdekaan, menyerukan hak-hak bagi para pekerja dan petani (Ricklefs, 2008). (3). PKI (Partai Komunis Indonesia): PKI mengadopsi teori Marxis langsung untuk melawan penindasan kolonial melalui perjuangan antar kelas. PKI mengajarkan bahwa meskipun pembebasan politik itu penting, kebebasan sejati bagi rakyat Indonesia akan mencapai klimaksnya ketika mereka memiliki sistem yang bebas dari ketidakadilan ekonomi. Menurut mereka, hanya dengan demikian kebebasan yang dicapai oleh rakyat Indonesia akan menjadi benar (Robinson, 2009).

Peran Tokoh-Tokoh Perjuangan Kemerdekaan

Perjuangan kemerdekaan di Indonesia diperhitungkan oleh para tokoh pejuang kemerdekaan seperti Soekarno, Moh Hatta, Tan Malaka, dan lainnya dalam peran penting yang dimainkan. Selain berjuang dengan menggugah kesadaran rakyat, mereka juga menyerukan perlunya melawan kolonialisme.

Sebagai tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Soekarno memiliki andil yang sangat besar dalam merumuskan ideologi dan kepemimpinan dalam melawan penjajahan Belanda. Pada awal pergerakan kemerdekaan, Soekarno aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, dan akhirnya mendirikan PNI untuk memperjuangkan organisasi yang lebih baik di Indonesia. Sangat dikenal, Soekarno dianggap sebagai seorang ahli dalam membawa semangat mobilisasi rakyat Indonesia melalui pidato yang mahir; salah satu pidatonya yang paling terkenal adalah "Indonesia Menggugat", yang secara terbuka mengkritik

kebijakan kolonial Belanda dan mengklaim hak Indonesia untuk merdeka (Soekarno, 1966).

Perjuangan Soekarno tidak hanya dalam politik dalam negeri, tetapi juga ketika bangsa Jepang menyerah kalah kepada Sekutu di tahun 1945, yang kemudian diikuti dengan upaya Belanda untuk menjajah Indonesia kembali. Tepat tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno, bersama dengan Hatta dan tokoh-tokoh lainnya, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini menandai perubahan besar dalam sejarah Indonesia karena mengakhiri lebih dari 300 tahun penjajahan asing. Di awal perjuangan kemerdekaan, Soekarno juga memiliki peran besar dalam meletakkan fondasi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang kemudian menjadi ideologi negara dan titik acuan dalam kehidupan moral dan politik ketika bangsa ini bekerja melalui identitas politik dan nasionalnya (Soekarno, 1966).

Di tingkat internasional, Soekarno berinisiatif untuk menggalang solidaritas antara negara-negara yang baru merdeka dan mengupayakan hak-hak untuk memerintah sendiri melalui berbagai forum internasional. Sebagai contoh adalah Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang dapat berlangsung pada tahun 1955 di Bandung, yang menetapkan peran Soekarno dalam mendukung negara-negara pascakolonial agar mereka mendapatkan tempat yang layak dalam teater politik global. Konferensi ini menjadi bukti bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno berkomitmen untuk menjadi kekuatan moral dalam masyarakat internasional dalam menentang kolonialisme dan mendukung gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah (Deliar Noer, 1996).

Hatta dengan Soekarno, Hatta merupakan salah satu tokoh utama dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, saat itu Belanda berusaha merebut kembali Indonesia. Dalam situasi yang genting seperti itu, Hatta dan Soekarno bersama tokoh-tokoh lainnya memutuskan untuk menyatakan bahwa Indonesia akan merdeka. Dengan pendidikan dan pengalaman politik yang baik, ia memainkan peran penting dalam menyusun teks proklamasi dan menjadi pendamping Soekarno sebagai wakil presiden pertama Indonesia.

Selain sebagai pemimpin proklamasi, Hatta juga merupakan seorang negarawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Peran ini menjadi bukti komitmen Hatta untuk melihat Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya, dan tidak terjerumus ke dalam ketergantungan politik dan ekonomi terhadap kekuatan asing (Miller, 2011).

Setelah Indonesia merdeka, Hatta memainkan peran yang sangat penting dalam perumusan prinsip-prinsip dasar negara. Melalui kepeduliannya yang mendalam terhadap kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, Hatta secara aktif terlibat dalam perumusan Pancasila bersama dengan Soekarno sebagai landasan ideologis negara. Baginya, Pancasila harus menjadi sebuah standar yang dapat mengakomodasi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan agama, etnis, atau golongan. Bagi Hatta,

Pancasila lebih dari sekedar dasar negara, melainkan juga merupakan panduan moral dan politik dalam kehidupan berwarga negara. Hal ini adalah cerminan langsung dari visinya untuk menciptakan negara yang demokratis dan berkeadilan sosial (Suwito, 2000).

Secara keseluruhan, Hatta memainkan peran yang sangat penting dalam mengarahkan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan dalam membuat sketsa negara merdeka yang berdaulat dengan keadilan sosial sebagai tujuan utama. Sebagai seorang pemikir dan praktisi politik, Hatta membuktikan dirinya sebagai sosok yang berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan impian Indonesia merdeka.

Lebih lanjut, Tan Malaka mengintegrasikan teori Marxis melalui analisis sosial perjuangan pembebasan rakyat Indonesia sebagai bagian dari perlawanan kelas terhadap kolonialisme. Menurut pandangan Marx, sejarah adalah narasi perjuangan kelas yang puncaknya adalah tindakan revolusioner untuk menggulingkan struktur kekuasaan yang menindas. Tan Malaka melihat penjajahan Belanda tidak hanya sebagai dominasi politik tetapi juga eksploitasi ekonomi yang menguntungkan kaum penindas sementara rakyat Indonesia menderita akibat penindasan.

Dalam salah satu karya terbaiknya, *Naar de Republiek Indonesia* (Menuju Republik Indonesia), Tan Malaka mengatakan bahwa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya hanya melalui revolusi sosial yang melibatkan seluruh rakyat. Dia mengatakan bahwa masyarakat, secara umum, harus menyadari bahwa mereka adalah bagian dari kelas-kelas, dan mereka harus menentang kekuatan kolonial Belanda, yang baginya adalah kaum borjuis yang menindas. Dengan demikian, bagi Tan Malaka, perjuangan kemerdekaan di Indonesia adalah bagian dari revolusi kelas yang lebih besar untuk menghapuskan sistem kolonial kapitalis dan mewujudkan negara yang lebih adil dan merata (Malaka, 1987).

Tan Malaka terinspirasi oleh teori-teori Marx dalam mendirikan Partai Murba pada tahun 1948, setelah kemerdekaan Indonesia. Partai ini berusaha mewujudkan cita-cita sosialisme berdasarkan prinsip-prinsip Marxisme. Tan Malaka berpendapat bahwa setelah kemerdekaan politik Indonesia pada tahun 1945, perjuangan harus diarahkan untuk menciptakan sistem sosial yang lebih adil dengan mensejahterakan rakyat (Ricklefs, 2001).

Sebenarnya, Tan Malaka mengatakan bahwa revolusi sosial yang benar-benar revolusioner akan terjadi apabila rakyat Indonesia melepaskan diri dari ketergantungan ekonomi yang sangat paralel dengan kekuatan asing dalam muat-muat meskipun sudah menegakkan sendiri kemerdekaan itu. Hal ini selaras dengan ajaran Marx yang menyebutkan bahwa ekonomi itu seharusnya diinjamkan dari tangan rakyat dan tidak hanya dimiliki oleh kelompok kelas borjuasi atau elit yang mencengkram negara dan perekonomian (Poespoprodjo, 1989).

Tan Malaka menegaskan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan titik akhir perjuangan. Memang, Indonesia bisa dikatakan merdeka secara politik, tetapi negara tersebut masih terbelenggu dalam

ketidakadilan sosial dan ekonomi akibat warisan kolonial. Karenanya, Tan Malaka menekankan pentingnya revolusi sosial yang harus dilanjutkan setelah proklamasi kemerdekaan. Sangat terkenanya pengaruh oleh teori Marx, Tan Malaka berpendapat bahwa tidak hanya struktural politik yang harus diubah oleh revolusi, melainkan juga struktur sosial dan ekonomi yang ada.

Bagi Tan Malaka, melawan Belanda bukan sekadar mengusir penjajah, tetapi juga merombak struktur sosial-ekonomi secara lebih radikal yang akan memerlukan distribusi sumber daya yang lebih adil. Sebagai seorang yang sangat peduli dengan isu-isu kesejahteraan rakyat, Tan Malaka sangat yakin bahwa revolusi apapun di Indonesia tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan politik struktural yang dilengkapi dengan basis ekonomi yang menindas. Argumen ini mengindikasikan bahwa Tan Malaka memvisualisasikan perjuangan untuk pembebasan hanya sebagai awal dari proses revolusioner yang lebih signifikan yang bertujuan untuk membangun kesetaraan sosial dan ekonomi yang lebih besar di dalam negara (Ricklefs, 2001).

Pada saat yang sama, Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dapat dengan mudah dipahami sebagai pembebasan politik, tetapi juga merupakan langkah awal menuju pembebasan kelas. Bagi Marx, emansipasi kelas adalah akhir dari revolusi sosial. Oleh karena itu, bahkan setelah mencapai kemerdekaan politik, perjuangan untuk membangun tatanan sosial-ekonomi yang adil masih akan terus berlanjut.

Proklamasi ini dapat dianggap sebagai keberhasilan yang paling representatif dari perjuangan kelas proletariat Indonesia di bawah bentuk kolonialisme yang terasingkan. Kemerdekaan Indonesia, bagaimanapun juga, adalah simbol dari keberhasilan ini; pembangunan masyarakat yang lebih adil dengan kesenjangan yang lebih rendah terus berlanjut (Denny, 2002).

KESIMPULAN

Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak hanya melambangkan berakhirnya penjajahan secara politik, tetapi juga menjadi simbol pembebasan kelas bagi rakyat Indonesia yang telah lama terjajah. Dilihat dari perspektif teori Marxis, perjuangan kemerdekaan ini dapat dilihat sebagai perjuangan kelas proletar melawan kaum borjuis kolonial yang mengeksploitasasi sumber daya alam dan tenaga kerja rakyat Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri, sekaligus menjadi tugas utamanya. Namun, berbeda dengan gagasan kemerdekaan politik, Indonesia masih menghadapi tantangan besar setelah proklamasi untuk menerapkan modus keadilan sosial-ekonomi yang sama sekali berbeda, bersamaan dengan restrukturisasi kelas-kelas sosial yang mengeksploitasi dengan tujuan keadilan sosial bagi semua (Ricklefs, 2008).

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, B. (2006). *Anderson Benedict (2006) Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism—Revised Edition, First published by Verso 1983 This edition published by Verso 2006.*
- Bauer, P. T. (2012). *Capitalism and the Colonial State in Southeast Asia.* Routledge.
- Behrend, T. (1983). *Colonialism and the Cultivation of Coffee in Java.* Cambridge University Press.
- Cohen, A. (2013). *Marxism and the National Question in the Context of Colonialism.* Cambridge University Press.
- Denny, M. (2002). *Indonesia: Politics and Development.* Palgrave Macmillan.
- Friedman, J. (1995). *Nationalism and Colonialism in Indonesia: An Analysis of the Marxist-Leninist Movements.* University of Indonesia Press.
- Haris, A. (2008). *Budi Utomo and the Rise of Indonesian Nationalism.* Southeast Asia Studies.
- Hutomo, S. (2011). *Class Struggles in Indonesian Nationalism.* *Journal of Indonesian History*, 34(2), 155-173.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah, Tiara Wacana, Yogyakarta, Edisi Kedua, 2003.*
- Malaka, T. (1987). *Naar de ' Republiek Indonesia ' Menuju Republik Indonesia. 1925, 1–51.*
- Marx, K. (1867). *Das Kapital: A Critique of Political Economy.* Penguin Classics.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *The Communist Manifesto.* The Communist League
- Miller, T. (2011). *Making Sense of Fatherhood.*
- Mudzakir, A., & Sutrisno, J. (1997). *Psikologi pendidikan.* Bandung: Pustaka Setia, 34.
- Noer, D. (1996). *Pemikiran Politik di Negeri Barat.*
- Poespoprodjo, M. (1980). *The Impact of Dutch Colonialism on the Indonesian Social Structure.* *Indonesia Journal*, 29(3), 45-58.
- Poespoprodjo, S. (1989). *Tan Malaka: Pemikiran dan Perjuangannya.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (1993). *A History of Modern Indonesia since c .1200. A History of Modern Indonesia since c .1200.* <https://doi.org/10.5040/9781350394582>.
- Ricklefs, M. C (2001). *A History of Modern since c. 1300.* Stanford University Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia.* Stanford University Press.
- Robinson, G. E. (2009). *The Indonesian Revolution and the Struggle for Independence.* Oxford University Press.
- Sartono, K. (2004). *Colonial Economics and the Rise of the Nationalist Movements in Indonesia.* Southeast Asia Press.

- Situmorang, I. (2015). The Role of Class Consciousness in the Indonesian National Movement. *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(1), 12-25.
- Smith, P. (2000). *Revolution and National Liberation in Southeast Asia*. Oxford University Press.
- Soekarno. (1966). *Indonesia Menggugat*. Soekarno Publisher
- Sugiyono, (2016). (2012). Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. CV. Alfabeta. Bandung. In *Data Kualitatif*.
- Suwito, R. (2009). Feudalism and the Colonial Legacy in Indonesia. *Social Dynamics Journal*, 45(4), 234-247
- Vickers, A. (2005). A history of modern Indonesia. *A History of Modern Indonesia*, 1-292. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511801020>.
- Wang, Z. (2018). Indonesia's Struggle for Social Justice After Independence. *Journal of Asian Politics*, 25(2), 67-89